

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**[Telaah Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]**

Skripsi

Oleh :

A. Zainal Abidin

NIM. C03213001



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Zainal Abidin
Nim : C03213001
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman
Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi [Telaah
Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi]

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagaian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



A.Zainal Abidin

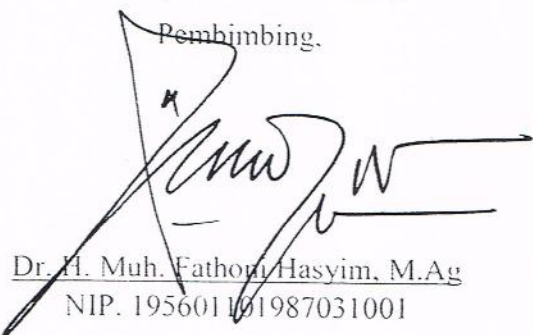
NIM. C03213001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A. Zainal Abidin NIM. C03213001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembimbing,



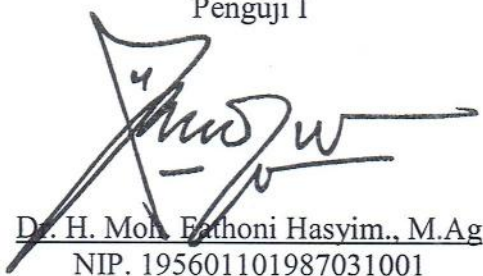
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh A. Zainal Abidin (NIM. 03213001) ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.


Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim., M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II




Drs. Ach. Yasin., M.Ag
NIP. 196707021996031002

PENGUJI III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh., SH, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin., SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 05 februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,
Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Zainal Abidin
NIM : C03213001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : abidin_hasyim@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI [telaah atas pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi]


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 februari 2018

Penulis


(A. Zainal Abidin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Telaah Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi)”. Adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 2) Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, putusan dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjabarkan tentang Ketentuan pidana denda dalam kejahatan korupsi di tingkat *extraordinary crime* ditinjau hukum pidana Islam yaitu bentuk pemberian hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Sementara itu, penerapan pidana denda dengan menggunakan prinsip proporsional bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hukum pidana Islam menggunakan prinsip *restorative justice* dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian. Kemudian hukuman denda dalam pidana Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya memberi nafas terhadap pemberlakuan hukum Nasional.

Kata kunci: *korupsi, Pidana Uang Pengganti, hukum Pidana Islam*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	15

LATAR BELAKANG

Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok.¹

Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.²

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, kenyataannya korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang berdampak

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 5.

Sudah banyak langkah teoritis dan praktis dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini.⁶ Dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi dalam hukum positif Indonesia masuk dalam daftar *extraordinary crime*.⁷ Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu tahap elitis, “korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat”. Pada tahap kedua yaitu *endemic*, “korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas”. Kemudian di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa”. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik.⁸

⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.¹¹ Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

¹¹ Murtir Jeddawi, *Manifestasi Otonomi Daerah Arah Kebijakan Publik dan Relasasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), 185.

pokok dalam Pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:¹²

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan hukum pidana Islam, Islam menetapkan aturan hukum syari'at, yang mana tujuan utama syari'at Islam ialah untuk menjaga dan melindungi lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqasid al-shar'iyah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-*

Kelima *al-maqasid al-shar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fi al-dunya hasanah, wa fi al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi dan/atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghair sarih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁴

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. An-nisa' ayat 29 yaitu:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Selain itu, penjelasan mengenai korupsi juga termuat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:¹⁶

وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Lebih spesifik lagi, pada surat Ali Imran ayat 161 korupsi termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan wewenang),¹⁷ dimana pelakunya menyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat, demi kepentingan pribadinya. Jadi

¹⁵ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 98

¹⁶ Ibid., 36.

¹⁷ Lihat surat Ali Imran ayat 161

Meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan *had* atau dendanya, bukan berarti pelaku korupsi bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi *ta'zir* yang kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*).¹⁸ Tentunya kebijakan tersebut tidak serta merta berdasarkan pada kepentingan hawa nafsunya, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *takzir* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *gharamah*.²⁰

²⁰ Ibid., 267.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang No
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar
konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi
untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan

dan Batasan Masalah

latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah
an bahan penelitian diantaranya:

n hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi
an ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang No
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar
konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi
untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan

dan Batasan Masalah

latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah
an bahan penelitian diantaranya:

n hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi
an ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang No
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar
konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi
untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan

dan Batasan Masalah

latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah
an bahan penelitian diantaranya:

n hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi
an ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang No
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar
konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi
untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan
- dan Batasan Masalah**
- latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah
an bahan penelitian diantaranya:
- n hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi
an ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang No
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aga
konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi
untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan

dan Batasan Masalah

latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah
an bahan penelitian diantaranya:

n hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi
an ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-

1. Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Penerepan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah pembahasannya dan lebih signifikan, maka perlu adanya rumusan masalah yang dibahas, antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi

pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

D. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

- a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan masalah terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum di bidang korupsi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.²¹

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana korupsi telah banyak yang menulis, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis Dian Rudy Hartono, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam” Hasil penelitian ini, bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk keadilan negatif. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika (adab) berpolitik. Pelaku kejahatan korupsi menyalahgunakan amanat yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks

²¹Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: T.P, 2014), h. 8.

penyelenggaraan negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan dilarang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkannya.²²

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Yuli Rohmatul Hidayah jurusan Siyasah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya (sebelum berubah menjadi UIN) tahun 2007 berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 (Kajian Filsafat Hukum)” inti dari pembahasan skripsi tersebut adalah tentang sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 pasal 8 mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp. 150.000.00,00 dan maksimal Rp. 750.000.000,00. Serta pengasingan berupa kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan telah memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan, karena telah memberikan rasa jera bagi pelakunya dalam bentuk moril dan materiil.²³

Skripsi lain ditulis oleh Achmad Nasrudin jurusan Siyasah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan *Corporate Crime* (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”.

²² Dian Rudy Hartono, *“Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”* (Skripsi--- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Dari beberapa kajian yang membahas tentang korupsi, akan tetapi belum ada satupun judul skripsi yang menyerupai judul yang diajukan penulis, yakni tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, definisi operasional dari judul tersebut adalah:

[illegible]

1. Syariat Islam adalah segala ketentuan Allah Swt., yang ditujukan untuk hamba-hamba-Nya, baik baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.²⁵
2. fikih adalah hukum-hukum syariat yang menyangkut praktek keagamaan (*amaliyah*) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.²⁶
3. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*. Dan lebih di fokuskan lagi yaitu tentang *jarimah takzir*. *Jarimah takzir* itu sendiri adalah tindak pidana yang belum ada ketetapannya dalam syariat Islam, dan ketentuan sanksi diserahkan kepada ulil amri.
4. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara.²⁷
5. hukukman penambahan berupa ganti rugi yang dimaksud disini adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang

²⁵ Bambang Subandi, Dkk, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), cet. Ke-3, 35.

²⁶ Ibid, 39.

²⁷ Munir Fu'ady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), 4.

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁸ Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ada dua sumber, meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁹ diantaranya bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Sumber sekunder, adalah sumber yang didapati dari buku, surat kabar, dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2004) 1.

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu cara mengali data dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen. Dalam hal ini salah satunya dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Teknik pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dari buku dan literatur lain yang relevan. teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang teori hukum pidana Islam, dalam hali ini teori *jarimah takzir*.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:³⁰

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan

³⁰ Bambang Sanggona, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

c. *Analyzing*, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab tiga dan menganalisa pada bab empat dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan dan menjelaskan data secara keseluruhan. Kemudian di analisis dengan menggunakan analisis Hukum Pidana Islam yaitu teori *jarimah takzir*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari fariabel bersifat umum kemudian diklasifikasikan ke fariabel bersifat khusus.

[illegible]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua bab ini berisi tinjauan umum tentang *jarimah takzir*, yaitu meliputi: definisi, dasar hukum, dan jenis.

Bab tiga berisi deskripsi, ketentuan, dan penerapan penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab empat berisi tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata جَرَمَ yang sinonimnya كَسَبَ وَقَطَعَ artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dilihat dari segi hukum pidana Islam kata *jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.¹

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah:

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian *jarimah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-

¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), 13.

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut.²

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *takzir*.

B. Bentuk-Bentuk *Jarimah*

1. *Jarimah Hudud*

Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah

³Ibid., 11.

Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *takzir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).

oh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), 12.

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti

mengenaikan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *takzir*, termasuk kedalam larangan Allah Swt dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa

atas.⁶

E. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

criminal act untuk maksud yang sama.⁷

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan

⁶ Ibid.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), Cet II, 86.

cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana itu sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁸

Masalah korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *mua'amilah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi atau keuangan) dan *fiqih siyasa* (hukum tata Negara). dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. An-nisa' ayat 29 yaitu:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Korupsi bisa dikategorikan dalam *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3.

⁹ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 89

Menurut hukum pidana Islam, ada Sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), khianat, *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *as-sariqoh*, dan *al-hirabah* (perampokan).

Baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sama bisnis, harta negara harta zakat, dan lain-lain.¹¹

Risywah adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan

¹¹ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 81.

3. *Ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain)

4. Khianat

Penjelasan makna kata “خَائِنٌ” yang dikemukakan al-syaukani, juga dikemukakan oleh Syamsul Haq Al-Azim abadi dalam ‘Aun al-Ma’bud dan al-Mubarakfuri dalam Tuhfah al-Ahwadzi secara detail dan lengkap. Ia mengatakan bahwa dalam kitab al-Mirqah, pengarangnya berkata bahwa

¹² Ibid., 89

Kha'in adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk (merawat/mengurus) suatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan Kha'in mengaku jika barang itu hilang atau ia mengingkari barang sewaan atau titipan tersebut ada padanya.

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembataian terhadap kaum muslim atau sikap menempatkan permusuhan terhadap kaum muslim.¹⁴

Tidak seperti dalil-dalil *ghulul*, *risywah*, dan *ghasab*. Pada jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori *jarimah takzir*, bukan pada ranah *hudud* dan *kisas/diat*.

¹⁴ Ibid., 91

tidak setuju dengan pendirian Umar Bin Khaththab, yang beranggapan bahwa pengkhianat layak dihukum mati oleh Rasulullah (sebagai kepala Negara di Madinah ketika itu). Seorang pengkhianat itu bernama Hatib bin Abi Balta'ah, ia membocorkan rahasia kaum Muslim yang berencana melakukan Fathu Makkah bersama Rasulullah. Sikap dan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Negara Islam. Jika bukan karena kebijaksanaan yang dilakukan Rasulullah dan arena keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam perang Badar, tentu ia mendapatkan hukuman berat.¹⁵

Kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini dikemukakan oleh imam al-bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam masalah maghazi, isti'dzan, dan istitabah al-murtadin. Dari hadits ini bisa diketahui beberapa hal. Pertama, mukjizat Rasulullah yang bisa mengetahui secara pasti seorang kurir wanita yang membawa surat rahasia milik Hatib Bin Abi Balta'ah. Kedua, keterlibatan dan kaikutsertaan Hatib Bin Abi Balta'ah dalam perang badar dan kejujuran jawabannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipertimbangkan oleh Rasulullah sehingga ia dibebaskan dari hukuman berat sebagai pengkhianat adalah berupa hukuman mati, keempat ketundukan Umar bin al-Khattab terhadap kebijaksanaan Rasulullah

¹⁵ Ibid., 97

Dengan demikian, hukuman *takzir* bagi seorang yang mengkhianati Allah, Rasulallah, dan seluruh kaum muslim seperti hatib bin abi balta'ah adalah berupa hukuman mati, walaupun atas pertimbangan dan ijtihad rasulullah hukuman berat ini tidak perlu diberlakukan mengingat ia telah bersikap jujur dan tulus, bahkan ia juga seorang yang berjasa besar mengikuti perang badar.¹⁷

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Syarat-syarat *jarimah sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan kerana pelakunya sanget terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.¹⁸

¹⁶A. Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, 76

sembunyi.²¹

F. Turut Serta Melakukan Jarimah

pernyataan) atau *isytirak al-jarimah*.²²

Qutni, Rasulullah bersabda:

اِذَا امْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يَقْتُلُ الَّذِي قَتَلَ وَيَحْبِسُ الَّذِي اَمْسَكَ

Artinya : jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung.

²¹ Ibid, 103.

²² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* ..., 98.

²³ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*. Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah*. Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*. Dimana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir.²⁵

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 67.

Dari uraian tersebut terlihat dengan sangat jelas perbedaan antara gabungan dengan pengulangan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Letak perbedaan antara keduanya adalah dalam hal apakah pelaku dalam *jarimah* yang pertama atau sebelumnya sudah dihukum (mendapat keputusan terakhir), itu termasuk gabungan dan kalau sudah itu termasuk pengulangan, seharusnya pelaku pada penggabungan *jarimah* tidak dijatui hukuman atas semua *jarimah* yang dilakukannya, meskipun gabungan *jarimah* tersebut menunjukkan jiwa kejahatannya. Hal ini oleh karena ia mengulangi suatu perbuatan *jarimah*, ia belum mendapatkan hukuman dan pengajaran dari *jarimah* sebelumnya. Berbeda dengan mengulangi kejahatan yang telah mendapatkan hukuman dan dengan hukuman itu dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu teori saling memasuki (*at-tadakhul*) dan penyerapan (*al-jabb*).

Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh

[illegible]

karenannya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarimah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:²⁷

- 1) Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja
 - 2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.
- b. Teori penyerapan (*al-jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup satu saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

H. Takzir

1. Pengertian *Takzir*

takzir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ- يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالنَّعْيُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti

²⁷ Ibid., 80.

Hukum *takzir* oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.³³ Pada jarimah *takzir* al-Qur'an dan al-Hadith tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.³⁴ Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah takzir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman *takzir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁵

ari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *jarimah* yang digunakan dalam hukum Islam memiliki makna yang berbeda-beda oleh syarak. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah* yang dimaksudkan adalah hukuman yang dikenakan oleh syarak dinamakan *jarimah takzir*. Sedangkan di kalangan *usuliyah*, *jarimah* yang dimaksudkan adalah hukuman yang dikenakan oleh syarak dinamakan *jarimah takzir*. Sedangkan di kalangan *usuliyah*, *jarimah* yang dimaksudkan adalah hukuman yang dikenakan oleh syarak dinamakan *jarimah takzir*. Sedangkan di kalangan *usuliyah*, *jarimah* yang dimaksudkan adalah hukuman yang dikenakan oleh syarak dinamakan *jarimah takzir*.

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Takzir*

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberapa hadits

³²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt.Kharisma Ilmu), 84.

³³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992), 548.

³⁴ Ja'ih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Badung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

³⁵ Makhruh Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

3) Hadith ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *takzir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

ditelentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkara “asahlah dulu pisau itu”.

3. Macam-Macam Sanksi *Takzir*

a. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi *takzir* itu beragam. Adapun mengenai sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab ini, yaitu qishas pembunuhan. Pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).⁴¹

Berdasarkan hadits tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, hadits yang diriwayatkan al-Dailami dianggap lemah.

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang memperbolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya
- b) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi, hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

⁴¹ Ibid., 72

1) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah takzir*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu *muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah *takzir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif, karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, kerana dirasakan langsung secara fisik
- Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda
- Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penetapannya sangat praktis
- Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

a. Sanksi *Takzir* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁴²

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.⁴³

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Ustman yang memenjarakan Zhabi' dan Harist (seorang pencopet dari Bani

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 74

⁴³ Ibid., 75

Tamim), Ali memenjarakan Abdullah bin Zubair di makkah, dan Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:⁴⁴

2) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarimah* penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa halangan, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin dan bersaksi palsu.

Tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi, *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam al-Mawardi,⁴⁵ batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah,

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, 76.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 81

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terdakwa meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

4) Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman *hudud*. Menurut sebagian *fqaha*, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampok adalah hukuman *hudud* mendorong *fqaha* untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *takzir*.⁴⁶

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman *takzir*. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan

[illegible]

bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (beresefek jera). al-Qur'an secara jelas menyebutkan hukuman peringatan

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’[4]: 34).⁴⁷

Dalam hukum Islam, masih ada hukuman *takzir* yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkan nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman *takzir*.

Hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal ini dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya).

6) Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

Diantara hukuman *takzir* dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam al-Quran, surah an-nisa’ ayat 34:⁴⁸

Artinya; hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Harapan, 2006), 201

⁴⁸ Ibid., 89

Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Kaáb Bin Malik, Mirarah Bin Rubaiáh Al-Amiri, Dan Hilal Bin Umaiyyah. Ketiganya dikucikan selama lima puluh hari tanpa diajak berbicara.

8) Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman *takzir*, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdid* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.⁴⁹

Tasyhir adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan

[illegible]

Hukuman *takzir* dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas.Ini karena hukuman *takzir* tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan Legislatif (*hayáh at-tasyriiyyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana.

- [illegible]

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulagi perbuatan *jarimah* dikemudian hari
- 3) Kuratif (islah). *Takzir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pula hidupnya ke arah yang lebih baik.

[illegible]

dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *takzir* agar mengulangi perbuatannya.⁵¹

dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *takzir* agar mengulangi perbuatannya.⁵¹

**PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PASAL 18 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut merupakan perbuatan sengaja atau merupakan suatu kekelakaan.¹

Untuk pertama kalinya secara normatif Pengertian korupsi mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) a dan b UU No. 3 Tahun 1971, menyebutkan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi ialah:

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau

¹ Munir Fu'ady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), 4.

2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;²

Rumusan delik korupsi sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal di atas, dapat diambil unsur-unsur delik sebagai berikut:

- ³ Ibid., 5.

Selanjutnya istilah korupsi diserap dan diterima dalam perbendaharaan kata di Indonesia, sebagaimana menurut Poerwadarminta yang dituangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.⁵ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 4.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 524.

dimuat dalam berbagai literatur, yang menjelaskan tentang pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain:

1. Sayed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, menulis: Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat, singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁶
2. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁷
3. Dani Krisnawati dkk, mengutip ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton sebagai berikut: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi *absolute*.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 137

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 10

B. Ketentuan Pidana Pengganti

Dalam perkembangannya, prospek pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menemukan rohnya kembali pasca jatuhnya rezim orde baru di tahun 1998. Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tersebut adalah karena undang-undang pemberantasan korupsi yang lama dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pembedaan. Meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan, karena apabila kita melihat ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimum seumur hidup bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi, baik kecil, sedang maupun besar, ditambah dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah, maka harus kita hargai bahwa dilahirkannya Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwarnai semangat ingin memberantas korupsi secara lebih baik lagi.⁸

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang

⁸ www.anti.korupsi.org, diakses pada 25 september 2017

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

[illegible]

Di dalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa:

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.

[illegible]

Bagaimana tidak, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi, maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. UU No. Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan.¹⁰ Dengan aturan tersebut, orang-orang diharapkan akan berpikir dua kali untuk korupsi walaupun kenyataannya sekarang mereka masih kuat membayar.¹¹

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

¹¹ Ibid.

**ANALISIS HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan hukum yang tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹

67

Pada tahap ini adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dalam menghitung harta terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa baik itu pengeledahan dan penyitaan. Pasal 28 UU N0 31 Tahun 1999;

Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu di dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya. Karena dari awal penyidikan sudah diketahui seluruh aset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak lagi dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi. Adanya kewajiban tersangka melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

[illegible]

Pasal 29 ayat (1) tersebut juga akan membantu dalam menginventarisir tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang itu tidak dapat dilarikan melalui transfer antar bank. Dengan demikian milik tersangka dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.²

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

[illegible]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan dua sistem pembuktian. Yakni sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatife menurut undang-undang.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidana tambahan uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dampak praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.³

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan

[illegible]

tidak dapat dilaksanakan. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*.

Pesoalan utama penyelesaian uang pengganti adalah rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara. Menurut data BPKKP, tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31,38 % dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan.⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ditinjau dari segi pemidanaan, pidana ganti rugi dalam korupsi dengan hukum pidana Islam yaitu sebagai bentuk penghukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya.⁵

Hukuman atau jarimah dalam Islam terdiri dari atas *had*, *qisas*, dan *ta'zir*.⁶ Sedangkan sanksi bagi pelaku *ghulûl* adalah *ta'zir* karena harta yang

⁴ Ibid., 43.

⁵ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan, judul asli: *Nizam al-Uqubat*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Cet. 1, 269.

Ditinjau dari status hukumnya, para ulama berbendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya, apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.⁸

“Hakim menahan sebagian harta si terhakum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”⁹

⁹ Ibid., 266.

Ditinjau dari macam-macamnya, Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu, menghancurkannya, mengubahnya atau memilikinya. Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan.¹¹ Atas dasar pemikiran ini, maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan menggunakan *istihsan* membolehkan *itlaf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual.

¹⁰ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012), 113.
¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, 98
¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 266.

gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman dera.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringanya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Secara terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁴ Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

¹³ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam Islam...*, 246.

PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 77

an berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekam dalam rangka perdamaian. Kemudian hukuman d m tidak menetapkan batas terendah atau tertin diserahkan kepada hakim.

ran-peraturan dalam Undang-undang Undang-Un 9 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat r rna pentingnya menaati peraturan yang sudah a n rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pi

an berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekam dalam rangka perdamaian. Kemudian hukuman d m tidak menetapkan batas terendah atau tertin diserahkan kepada hakim.

ran-peraturan dalam Undang-undang Undang-Un 9 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat r rna pentingnya menaati peraturan yang sudah a n rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pi

- an berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekam dalam rangka perdamaian. Kemudian hukuman d m tidak menetapkan batas terendah atau tertin diserahkan kepada hakim.
- ran-peraturan dalam Undang-undang Undang-Un 9 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat r rna pentingnya menaati peraturan yang sudah a n rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pi

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2000.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sanggona. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Utama
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*, 1997. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendy, Fu'ady Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Rohmatul. *“Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 Kajian Filsafat”*. IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2007.

ad. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penpidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi)”*. Sunan Ampel. Surabaya, 2013.

ggi. *Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Perkarat Tindak Pidana Korupsi*. Tesis (tidak diterbitkan). Progam Pascasarjan Universitas Andalas Padang, 2011.

ne.com

si.org

dan Sanksi Pidana di Bawak Pidana Korupsi. Tesarjan Universitas Andal

d digilib.uinsby.ac.id digilib.u